

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Kemiskinan

a. Definisi Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh semua negara terutama di negara berkembang. Kemiskinan bersifat multidimensional, yang berarti karena adanya macam-macam kebutuhan manusia, maka kemiskinan juga mempunyai banyak aspek primer berupa miskin akan aset, pengetahuan, ketrampilan dan organisasi politik serta aspek sekunder yang berupa miskin akan sumber-sumber keuangan, jaringan sosial dan informasi. Aspek-aspek kemiskinan ditunjukkan dalam bentuk tingkat pendidikan yang rendah, gizi yang kurang, perumahan yang kurang sehat, dan perawatan kesehatan yang buruk. Disamping itu, aspek-aspek kemiskinan saling berhubungan secara langsung ataupun tidak langsung. Hal itu berarti apabila terjadi kemunduran atau kemajuan pada salah satu aspek maka akan berpengaruh terhadap kemunduran dan kemajuan aspek yang lain (Arsyad, 1999).

Kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran dari sisi ekonomi. Dapat dikatakan

bahwa penduduk miskin merupakan penduduk yang mempunyai rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan (Badan Pusat Statistik, 2017).

Kemiskinan diklasifikasikan kedalam empat bentuk. *Pertama*, kemiskinan absolut yaitu kemiskinan yang tingkat pendapatannya berada pada posisi dibawah garis kemiskinan atau sejumlah pendapatannya tidak cukup untuk pemenuhan kebutuhan minimum. *Kedua*, kemiskinan relatif yaitu kemiskinan yang pendapatannya berada diatas garis kemiskinan, namun dibanding pendapatan masyarakat sekitarnya relatif lebih rendah. *Ketiga*, kemiskinan kultural karena mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan faktor budaya, misalnya, malas, boros, tidak kreatif, dan tidak mau berusaha untuk memperbaiki kehidupannya. *Keempat*, kemiskinan struktural yaitu kondisi kemiskinan yang disebabkan oleh ketimpangan pada pendapatan karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat (Jamasy, 2004).

Terdapat empat pola kemiskinan yaitu (Djojohadikusumo, 1995) :

1. *Persistent poverty* (kemiskinan turun-temurun).
2. *Cyclical poverty* (kemiskinan yang secara keseluruhan mengikuti pola siklus ekonomi).

3. *Seasonal poverty* (kemiskinan musiman, contohnya seperti kasus pada petani tanaman pangan dan nelayan).
4. *Accidental poverty* (kemiskinan yang disebabkan oleh menurunnya kesejahteraan pada masyarakat karena dampak dari suatu kebijakan atau terjadinya bencana alam).

Kemiskinan memiliki berbagai dimensi antara lain yaitu ketidakmampuan dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang, dan papan), tidak terdapat akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi, tidak memiliki jaminan masa depan karena tidak ada investasi untuk pendidikan dan keluarga), kualitas sumberdaya manusia yang rendah dan sumber alam yang terbatas, tidak terdapat akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan, ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental dan ketidakberuntungan sosial (anak terlantar, wanita korban tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marjinal dan terpencil (Sjafari,2014).

Kemiskinan secara ekonomi dapat dilihat dari tingkat kekurangan sumberdaya yang dapat digunakan dalam pemenuhan kebutuhan hidup dan peningkatan kesejahteraan sekelompok orang. Kemiskinan secara sosial psikologi dapat dilihat dari tingkat kekurangan struktur dan jaringan sosial yang mendukung dalam memperoleh peluang meningkatkan produktivitas, sedangkan secara

politik kemiskinan dapat dilihat dari tingkat akses terhadap kekuasaan yang memiliki pengertian tentang sistem politik yang dapat memutuskan kemampuan sekelompok orang dalam menjangkau sumberdaya (Suharto,2009).

b. Ukuran Kemiskinan

Garis kemiskinan (*poverty line*) diperlukan untuk menghitung jumlah orang miskin di suatu tempat. Garis kemiskinan diartikan sebagai angka yang memperlihatkan pendapatan yang rendah untuk bisa hidup secara layak. Garis kemiskinan antar lembaga dan antar negara itu berbeda tergantung dengan pertimbangan masing-masing lembaga atau negara yang menghitungnya, dengan demikian tidak ada satu garis kemiskinan yang berlaku secara umum karena standar kebutuhan hidup dan lokasi berbeda. Beberapa cara pengukuran garis kemiskinan adalah sebagai berikut (Hudiyanto, 2015) :

1.) Ukuran garis kemiskinan Bank Dunia (*World Bank*)

Bank Dunia (*World Bank*) menggunakan nilai pendapatan yang disetarakan dengan dollar sebagai ukurannya. Daerah perkotaan ditetapkan sebesar 75 dollar Amerika, sedangkan untuk daerah pedesaan ditetapkan sebesar 50 dollar Amerika perkapita per bulan.

2.) Ukuran garis kemiskinan Sayogya

Profesor Sayogya adalah seorang sosiolog yang menjadi pelopor penetapan garis kemiskinan di Indonesia. Sayogya menetapkan

garis kemiskinan dan menghitung jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan dalam Survei Evaluasi Proyek Usaha Perbaikan Gizi Keluarga (UPKG). Garis kemiskinan untuk daerah perkotaan ditetapkan setinggi pendapatan setara 360 beras perkapita per tahun, sedangkan untuk daerah pedesaan sebesar 240 kg beras per kapita per tahun.

3.) Ukuran garis kemiskinan Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik mendefinisikan kemiskinan dengan membuat kriteria besaran pengeluaran per orang per hari sebagai bahan acuan. Kriteria yang ditentukan Badan Pusat statistik adalah sebagai berikut :

- a. Tidak miskin, dengan pengeluaran per orang per bulan lebih dari Rp. 350.610
- b. Hampir tidak miskin, dengan pengeluaran per orang per bulan antara Rp. 280.488 – Rp. 350.610
- c. Hampir miskin, dengan pengeluaran per orang per bulan Rp. 233.740 – Rp. 280.488
- d. Miskin, dengan pengeluaran per orang per bulan Rp. 233.740 kebawah
- e. Sangat miskin, tidak ada kriteria berapa pengeluaran per orang per hari.

Badan Pusat Statistik menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic need approach*) untuk mengukur

kemiskinan. Dengan pendekatan ini dapat dihitung *Head Count Index* (HCI) yaitu persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Sumber data utama yang digunakan yaitu data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Panel Modul Konsumsi dan Kor.

Hidup dalam garis kemiskinan dapat diartikan dengan hidup serba kekurangan dan standar hidup yang rendah. Standar hidup yang rendah berpengaruh terhadap tingkat kesehatan, tingkat pendidikan yang rendah, pendapatan yang rendah, dan hal-hal lain seperti perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan terhadap ancaman tindak kriminal (Chriswardani, 2005).

c. Faktor Penyebab Kemiskinan

Kemiskinan adalah salah satu isu utama ekonomi, sama halnya dengan permasalahan lain, kemiskinan juga menjadi permasalahan ekonomi yang dapat diidentifikasi penyebab-penyebabnya. Faktor penyebab kemiskinan antara lain yaitu (Hartomo dan Aziz, 1997) :

1) Pendidikan yang terlampau rendah

Tingkat pendidikan yang tidak sesuai standar menyebabkan seorang individu sulit untuk mendapatkan kesempatan kerja

karena tidak memiliki ketrampilan dan kemampuan yang diperlukan dalam dunia kerja.

2) Keterbatasan modal

Permasalahan modal usaha secara umum dialami oleh sebagian besar masyarakat karena syarat-syarat yang terlampau sulit untuk dipenuhi, hal tersebut menjadikan masyarakat sulit untuk mengembangkan sektor wirausaha.

3) Keterbatasan lapangan kerja

Jumlah penduduk yang semakin bertambah, faktanya tidak disertai dengan jumlah kesempatan kerja yang mampu menyerap angkatan kerja.

4) Keterbatasan sumber daya alam

Suatu daerah yang potensi alamnya terbatas akan sulit dikembangkan karena eksploitasi yang dilakukan tidak mampu menjadikan daerah tersebut berkembang secara ekonomi. Aktivitas produksi yang terjadi di daerah tersebut tidak menghasilkan berbagai inovasi, berbeda dengan daerah yang memiliki potensi alam yang kaya sehingga mampu memberikan injeksi perekonomian yang lebih maju.

5) Beban keluarga

Masyarakat dengan jumlah anggota yang relatif banyak akan berpengaruh terhadap beban pengeluaran, apabila tidak diimbangi dengan perolehan jumlah pendapatan yang mencukupi kebutuhan

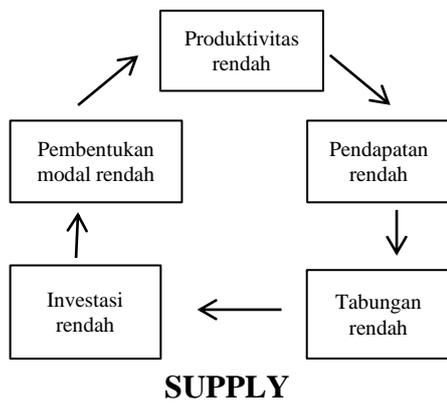
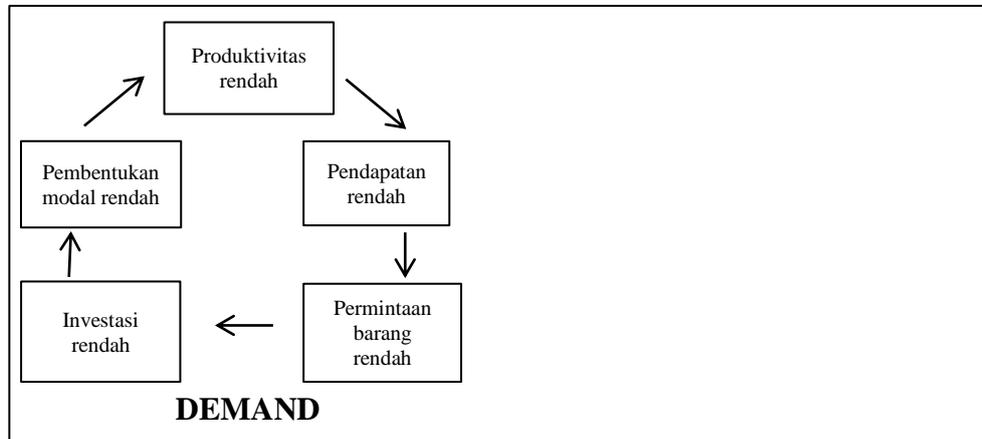
semua anggota keluarga maka kemungkinan terjadi kekurangan finansial pada keluarga tersebut.

Suatu lingkaran kemiskinan (*circle of poverty*) ditimbulkan karena permasalahan kemiskinan memiliki hubungan antara beberapa permasalahan. Kemiskinan disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut :

1. Ketimpangan distribusi pendapatan yang disebabkan oleh ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya, sehingga penduduk miskin hanya memiliki sumber daya yang terbatas dengan kualitas yang rendah.
2. Perbedaan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mengakibatkan kemiskinan. Produktivitas rendah yang disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia yang rendah, sehingga upah yang didapat juga rendah.
3. Kemiskinan disebabkan karena adanya akses modal yang kecil. Masyarakat miskin akan sulit mengembangkan suatu usaha untuk memperbaiki perekonomian mereka dengan modal yang kecil.

Ketiga penyebab kemiskinan ini berawal pada lingkaran kemiskinan (*circle of poverty*). Dengan adanya keterbelakangan, kurangnya modal akan menyebabkan rendahnya produktifitas. Rendahnya pendapatan yang diterima disebabkan oleh produktivitas yang rendah. Sehingga pendapatan yang rendah akan berdampak

terhadap rendahnya investasi dan tabungan masyarakat miskin
(Kuncoro, 2000).



Gambar 2.1

Lingkaran Kemiskinan yang Tidak Berujung Pangkal dari Nurkse (*Suryana,2000*)

Terdapat dua lingkaran kemiskinan, yaitu dari segi permintaan (*demand*) penanaman modal sangat rendah di negara-negara yang miskin karena luas pasar untuk berbagai macam barang adanya terbatas, hal ini dikarenakan pendapatan masyarakat yang sangat rendah. Pendapatan masyarakat yang rendah dikarenakan rendahnya tingkat produktivitas, sebagai wujud dari tingkatan pembentukan modal yang terbatas. Pembentukan modal yang terbatas disebabkan karena kurangnya perangsang untuk penanaman modal dan seterusnya. Dari segi penawaran (*supply*) dimana tingkat produktivitas yang rendah mengakibatkan tingkat pendapatan masyarakat rendah sehingga kemampuan masyarakat untuk menabung juga rendah. Rendahnya kemampuan untuk menabung mengakibatkan tingkat pembentukan modal rendah, tingkat pembentukan modal atau investasi yang rendah mengakibatkan kekurangan modal, dengan demikian tingkat produktivitas juga rendah dan seterusnya.

Dalam mengatasi kemiskinan diperlukan pemahaman terhadap penyebab dari kemiskinan tersebut apakah bersumber dari aspek kultural atau aspek struktural. Kemiskinan kultural merupakan kemiskinan yang penyebabnya yaitu faktor-faktor kebiasaan, kebudayaan, dan sikap mental penduduknya yang mengakibatkan

proses pelestarian kemiskinan dalam masyarakat itu terjadi. Sedangkan kemiskinan struktural merupakan kemiskinan yang penyebabnya yaitu struktur eksternal seperti kebijakan ekonomi yang tidak adil, tidak meratanya penguasaan faktor-faktor produksi, tidak meratanya penguasaan lahan, korupsi dan kolusi. Dalam upaya mengatasi kemiskinan juga dibutuhkan pemahaman terhadap lingkaran kemiskinan yang tidak berujung pangkal. Kemiskinan perlu diatasi dengan cara memutus salah satu mata rantai misalnya dengan memutus masalah ketiadaan modal pada penduduk miskin. Hal tersebut bisa dilakukan dengan pemberian modal yang memadai untuk penduduk miskin. Namun, apabila kemiskinan yang terjadi termasuk dalam kemiskinan kultural yang berupa faktor internal penduduk miskin itu sendiri, maka masalah kemiskinan juga harus diatasi secara kultural misalnya dengan melakukan pelatihan dan pendidikan terhadap penduduk miskin untuk hidup yang lebih maju, kreatif dan dinamis (Hudiyanto, 2015).

2. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia adalah indikator penting yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat atau penduduk. Level atau peringkat pembangunan suatu wilayah atau negara dapat ditentukan dengan Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia dapat menjelaskan bagaimana penduduk dapat menikmati hasil pembangunan

dalam memperoleh pendapatan, pendidikan, dan kesehatan. Indeks Pembangunan Manusia merupakan data strategis karena digunakan sebagai ukuran kerja pemerintah dan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum. UNDP (*United Nations Development Programme*) memperkenalkan Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 1990 dan mempublikasikannya dalam laporan tahunan HDR (*Human Development Report*) secara berkala. Indeks Pembangunan Manusia terdiri dari empat komponen yaitu Angka Harapan Hidup, Angka Harapan Lama Sekolah, Rata-Rata Lama Sekolah, dan Pengeluaran Riil per Kapita yang disesuaikan, sedangkan tiga dimensi dasar yang membentuk IPM adalah kesehatan, pengetahuan dan standar hidup yang layak. IPM dihitung dengan cara sebagai berikut berikut (Badan Pusat Statistik,2017) :

$$IPM = \sqrt[3]{I_{Kesehatan} \times I_{Pendidikan} \times I_{Pengeluaran}} \times 100$$

Untuk mengukur dimensi kesehatan digunakan Angka Harapan Hidup (AHH) , lalu untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), sedangkan untuk mengukur dimensi standar hidup layak digunakan indikator Pengeluaran Riil per Kapita yang disesuaikan.

1) Tingkat Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu faktor yang cukup penting dalam proses pembangunan. Di mana pendidikan merupakan upaya untuk melatih karakter, dan intelektual anak, agar dapat memajukan

standar hidup selaras dengan dunianya. Pendidikan yang baik dan berkualitas akan dapat mencetak generasi-generasi yang memiliki daya saing tinggi. Dalam mengukur dimensi pendidikan penduduk menggunakan dua indikator, yaitu harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Angka harapan lama sekolah adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang, sedangkan rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal.

2) Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup adalah indeks yang digunakan untuk mengukur jumlah tahun hidup yang diharapkan dapat dinikmati penduduk di suatu wilayah tertentu, dengan cara menggunakan informasi angka kelahiran serta kematian per tahun. Angka harapan hidup dapat dihitung menggunakan pendekatan tak langsung (*Brass, Varian Trussel*), dalam penghitungan angka harapan hidup ada dua jenis data yang digunakan yaitu anak lahir hidup dan anak masih hidup dari wanita yang sudah menikah. Untuk mendapatkan Indeks Harapan Hidup dengan cara menstandarkan angka harapan hidup terhadap nilai maksimum dan minimumnya.

3) Standar Hidup Layak

Dimensi lain dari ukuran kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak, aspek kehidupan yang layak diukur dari daya

beli masyarakat, UNDP menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) riil yang disesuaikan. Pengeluaran per kapita yang disesuaikan akan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli PPP (*Purchasing Power Parity*). Untuk menghitung IPM sub nasional (provinsi atau kabupaten/kota) tidak memakai PDRB per kapita karena PDRB per kapita hanya mengukur produksi suatu wilayah dan tidak mencerminkan daya beli riil masyarakat yang merupakan perhatian IPM. Sedangkan BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan data rata-rata konsumsi 27 komoditi terpilih dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dianggap paling dominan dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia dan telah distandarkan agar bisa dibandingkan antar daerah dan antar waktu yang disesuaikan dengan indeks *purchasing power parity* (Winarti, 2014).

Pembangunan merupakan suatu usaha untuk meningkatkan seluruh sumber daya yang berorientasi pada pembangunan masyarakat dan dilakukan secara berencana dan berkelanjutan. Dalam hal ini, pendidikan sebagai hal utama yang bertujuan untuk membuka kesadaran masyarakat dan menambah wawasan ke arah yang lebih baik (Effendi, 2002).

3. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah meningkatnya output masyarakat karena jumlah faktor produksi yang digunakan semakin banyak dalam proses produksi dan tanpa adanya perkembangan teknologi produksi itu

sendiri, misalnya pertumbuhan stok modal atau penambahan faktor-faktor produksi tanpa adanya perubahan pada teknologi produksi yang lama yang menyebabkan kenaikan output (Arsyad, 2010).

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan bertambahnya barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat dan meningkatnya kemakmuran masyarakat. Dengan demikian perlu dihitung pendapatan nasional riil menurut harga tetap yaitu pada harga-harga yang berlaku ditahun dasar yang dipilih untuk menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai. Jadi prestasi dari perkembangan suatu perekonomian diukur dengan pertumbuhan ekonomi (Sukirno, 1990).

Dalam pengertian ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi yaitu pertumbuhan PDB secara riil, yang berarti peningkatan pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi adalah kondisi dimana terjadi peningkatan PDRB. Kenaikan PDB digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi tingkat nasional, sedangkan peningkatan PDRB digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi tingkat daerah. Pertumbuhan ekonomi juga diartikan kapasitas ekonomi yang meningkat di suatu daerah dalam periode tertentu (Winardi, 2010).

Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai suatu proses yang meningkatkan kapasitas produktif secara berkesinambungan sepanjang waktu atau secara terus-menerus dalam suatu perekonomian sehingga menghasilkan output nasional dan tingkat pendapatan yang semakin lama

semakin besar. Terdapat tiga komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi yaitu (Todaro dan Smith, 2006) :

1. Akumulasi modal, meliputi semua jenis investasi baru yang ditanamkan pada sumber daya manusia, peralatan fisik, tanah dan modal.
2. Kemajuan teknologi.
3. Pertumbuhan penduduk yang akan memperbanyak jumlah angkatan kerja pada tahun-tahun berikutnya.

Menurut pandangan kaum historis, diantaranya Friedrich List dan Rostow, pertumbuhan ekonomi merupakan tahapan proses tumbuhnya perekonomian mulai dari perekonomian bersifat tradisional yang bergerak di sektor pertanian dimana produksi bersifat subsisten, hingga akhirnya menuju perekonomian modern yang didominasi oleh sektor industri manufaktur. Menurut pandangan ekonom klasik, Adam Smith, David Ricardo, Thomas Robert Malthus dan John Straurt Mill, maupun ekonom neo klasik, Robert Solow dan Trevor Swan, mengemukakan bahwa pada dasarnya ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu jumlah penduduk, jumlah stok barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, dan tingkat teknologi yang digunakan. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau berkembang apabila tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi dari pada apa yang dicapai pada masa sebelumnya (Kuncoro,2000).

Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan kenaikan kapasitas suatu daerah atau negara. Hal tersebut dilihat dari tiga hal yaitu laju pertumbuhan pendapatan perkapita riil, pola penyebaran penduduk, dan distribusi angkatan kerja menurut sektor kegiatan produksi (Budiono, 1999).

4. Upah Minimum

Upah adalah hak terhadap buruh atau pekerja yang diterima sebagai imbalan dari pemberi kerja atau pengusaha dinyatakan dalam bentuk uang dan dibayarkan menurut suatu kesepakatan, perjanjian kerja, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan atas suatu jasa dan pekerjaan yang akan dilakukan atau yang telah dilakukan. Upah minimum merupakan kebijakan sistem pengupahan yang pada dasarnya dapat dilihat dari dua sisi, yang pertama yaitu upah minimum adalah alat proteksi pada buruh atau pekerja dengan tujuan mempertahankan supaya tidak terjadi penurunan nilai upah yang diperoleh dalam pemenuhan kebutuhan hidup dan yang kedua yaitu upah minimum dijadikan alat proteksi bagi perusahaan dalam mempertahankan dan meningkatkan produktivitas pekerja (Simanjuntak, 2002).

Upah pada dasarnya merupakan sumber utama penghasilan seseorang, oleh karenanya upah harus cukup untuk memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarganya dengan wajar. Sebagai imbalan terhadap tenaga dan pikiran yang diberikan pekerja kepada pengusaha, maka pengusaha akan memberikan kepada pekerja dalam bentuk upah. Upah adalah suatu

penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau dilakukan dan dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan atas dasar suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan karyawan termasuk tunjangan, baik untuk karyawan itu sendiri maupun untuk keluarganya. Jadi upah berfungsi sebagai imbalan atas usaha kerja yang diberikan seseorang tersebut kepada pengusaha. Upah dibayar oleh pengusaha sesuai atau sama dengan usaha kerja atau produktivitas yang diberikan kepada pengusaha. Di beberapa negara maju dan berkembang, kebijakan upah minimum merupakan isu penting dalam hal ketenagakerjaan. Tujuan dari kebijakan upah minimum adalah untuk peningkatan produktivitas pekerja, terjaminnya pendapatan pekerja supaya tidak rendah apabila dibandingkan dari suatu tingkat tertentu, produksi yang lebih efisien untuk peningkatan dan pengembangan perusahaan (Sumarsono,2003).

Upah memiliki pengaruh besar terhadap permintaan dan penawaran tenaga kerja. Besar kecilnya penawaran tenaga kerja dipengaruhi oleh adanya perubahan upah. Tingkat upah yang relatif tinggi mengakibatkan peningkatan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan dan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan akan berkurang jika tingkat upah relatif rendah. Hal itu sesuai dengan hukum penawaran. Teori upah alam dari David Ricardo menjelaskan bahwa upah menurut kodrat yaitu upah yang cukup untuk pemeliharaan hidup seorang pekerja dengan keluarganya. Terdapat

upah menurut harga pasar yaitu upah yang ditentukan oleh permintaan dan penawaran dan terjadi di pasar. Menetapkan besarnya upah yang harus diberikan perusahaan terhadap tenaga kerjanya itu sangat penting. Undang-undang upah minimum menentukan harga yang paling rendah yang harus diberikan kepada tenaga kerja (Mankiw, 2007).

B. Pengaruh Variabel Independen Terhadap Variabel Dependen

1. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan

Teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya peranan pemerintah terutama dalam meningkatkan pembangunan modal manusia (*human capital*), mendorong penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas manusia. Dapat dilakukan dengan investasi pendidikan akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dapat dilihat dengan meningkatnya keterampilan dan pengetahuan seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahliannya akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas kerjanya. Perusahaan mendapat hasil yang lebih banyak dengan mempekerjakan tenaga kerja dengan produktivitas yang tinggi, sehingga perusahaan akan memberikan upah yang lebih tinggi pada yang bersangkutan. Di sektor informal seperti pertanian, peningkatan keterampilan dan keahlian tenaga kerja akan mampu meningkatkan hasil pertanian karena tenaga kerja mampu meningkatkan hasil pertanian karena tenaga kerja yang terampil mampu bekerja lebih

efisien. Pada akhirnya yang memiliki produktivitas tinggi akan mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik, hal tersebut ditunjukkan melalui adanya peningkatan pendapatan maupun konsumsinya. Rendahnya produktivitas kaum dapat disebabkan oleh rendahnya akses mereka untuk memperoleh pendidikan yang layak (Rasidin dan Bonar M, 2004).

Tiga dimensi penting dalam pembangunan yang dimuat oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah terkait dengan aspek kebutuhan akan hidup sehat (*healthy life*) dan hidup panjang umur (*longevity*) yang bertujuan memperoleh pengetahuan (*the knowledge*) dan memiliki akses kepada sumberdaya yang dapat untuk pemenuhan standar hidup. Jadi, tiga dimensi penting tersebut memiliki pengaruh penting terhadap kemiskinan (Mulyaningsih, 2008).

Pembangunan manusia identik dengan pengurangan kemiskinan di Indonesia. Investasi pada bidang kesehatan dan pendidikan bagi penduduk miskin akan jauh lebih berarti dibandingkan dengan penduduk tidak miskin. Hal itu disebabkan karena tenaga kasar mereka merupakan aset utama bagi penduduk miskin. Dengan adanya fasilitas kesehatan dan pendidikan yang layak dan terjangkau bagi penduduk miskin, akan membantu untuk peningkatan produktivitas dan peningkatan pendapatan (Lanjouw, 2001).

2. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan

Pertumbuhan ekonomi merupakan rangkuman dari aktivitas ekonomi suatu masyarakat pada periode waktu tertentu. Aktivitas ekonomi masyarakat yang meningkat maka akan meningkatkan juga jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian, sehingga pendapatan dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat dan diikuti dengan tingkat kemiskinan yang menurun (Mankiw, 2007).

Salah satu tujuan utama dari pembangunan suatu negara yaitu dengan terciptanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pembangunan diharapkan dapat mengurangi kemiskinan, tingkat pengangguran, dan ketimpangan pendapatan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Todaro dan Smith, 2006).

Dalam hal mengurangi kemiskinan, pertumbuhan ekonomi merupakan syarat keharusan (*necessary condition*), dan terdapat syarat kecukupannya (*sufficient condition*) yaitu pertumbuhan tersebut dinilai efektif untuk pengurangan masalah kemiskinan. Artinya, pertumbuhan tersebut harus bisa menyebar pada setiap golongan pendapatan, termasuk golongan penduduk miskin (Sukirno, 1999).

Kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi mempunyai hubungan yang sangat kuat, karena proses pembangunan tingkat kemiskinan cenderung meningkat pada proses awal dan jumlah orang miskin berangsur-angsur

berkurang pada saat mendekati tahap akhir pembangunan (Tambunan, 2011).

Pertumbuhan ekonomi memberikan manfaat secara langsung terhadap peningkatan pembangunan manusia dengan pendapatan yang meningkat. Pendapatan yang meningkat akan meningkatkan alokasi belanja terutama pada rumah tangga miskin untuk pendidikan dan makanan yang bergizi (Ranis, 2004).

3. Pengaruh Upah Minimum Terhadap Tingkat Kemiskinan

Upah merupakan aspek penting dalam menunjang para pekerja atau buruh untuk memenuhi kebutuhan. Para pekerja atau buruh dapat terjerat dalam kemiskinan apabila jauh dari kesejahteraan yang disebabkan oleh tingkat upah yang tidak sesuai untuk mencukupi standar hidup layak (Sulistiawati, 2012).

Upah minimum ditetapkan dengan tujuan utama yaitu pemenuhan standar hidup minimum seperti kesejahteraan pekerja, efisiensi dan kesehatan. Upah minimum merupakan usaha untuk mengangkat derajat pekerja miskin dan penduduk yang memiliki pendapatan yang rendah. Dengan upah minimum yang semakin meningkat akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga terbebas dari kemiskinan karena kesejahteraan yang meningkat (Kaufman, 1999).

Upah memiliki keterkaitan yang erat dengan pengangguran. Tinggi rendahnya upah akan berpengaruh terhadap jumlah permintaan dan penawaran tenaga kerja. Adanya perubahan upah akan mempengaruhi

besar kecilnya penawaran tenaga kerja. Dengan tingkat upah yang tinggi maka jumlah tenaga kerja yang ditawarkan akan meningkat, hal itu sesuai dengan hukum penawaran. Dan apabila tingkat upah relatif rendah maka jumlah tenaga kerja yang ditawarkan menjadi sedikit. Semakin berkurangnya pengangguran maka kemiskinan juga berkurang (Sukirno, 1990).

C. Hasil Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas masalah kemiskinan di berbagai daerah di Indonesia dengan variabel yang berbeda. Antara lain yaitu :

1. Purnamasari (2017) melakukan penelitian dengan judul “*Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014*”. Penelitian tersebut menggunakan variabel bebas yaitu pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan. Sedangkan kemiskinan di provinsi Jawa Timur digunakan sebagai variabel terikat. Metode *Fixed Effect Model (FEM)* digunakan untuk mengestimasi model regresi ini. Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif dan signifikan, dan variabel ketimpangan pendapatan memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan yang berada di Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2014.
2. Sholekah (2016) melakukan penelitian dengan judul “*Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan*

Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta (Studi Kasus Kabupaten/Kota Adm di Provinsi DKI Jakarta Periode 2008-2014)”. Penelitian tersebut menggunakan variabel bebas yaitu jumlah penduduk, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan pendidikan. Sedangkan tingkat kemiskinan pada provinsi di DKI Jakarta digunakan sebagai variabel terikat. Data sekunder berupa data panel digunakan dalam penelitian ini. Data tersebut terdiri dari *time series* periode tahun 2008- 2014 dan *cross section* 6 kabupaten di Provinsi DKI Jakarta. Metode *Fixed Effect Model (FEM)* digunakan untuk mengestimasi model regresi ini. Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk dan tingkat pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Sedangkan secara statistik, variabel TPT berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

3. Marudut (2016) melakukan penelitian dengan judul “*Analisis Pengaruh Indek Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi, dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010-201*”. Penelitian tersebut menggunakan variabel bebas yaitu Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran Terbuka. Sedangkan tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara digunakan sebagai variabel terikat. Penelitian ini menggunakan data panel yang merupakan gabungan antara *time series* periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 dan *cross section* 33

kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Metode *Fixed Effect Model (FEM)* digunakan untuk mengestimasi model regresi ini. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan secara simultan . Sedangkan secara parsial menunjukkan bahwa variabel Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan, sementara variabel tingkat pengangguran terbuka dan pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh terhadap penurunan kemiskinan.

4. Yulianti (2016) melakukan penelitian dengan judul “*Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Upah Terhadap Kemiskinan di Provinsi DIY Periode Tahun 2007-2013*”. Penelitian tersebut menggunakan variabel bebas yaitu Indeks Pembangunan Manusia, pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan upah. Sedangkan kemiskinan di Provinsi DIY digunakan sebagai variabel terikat. Dalam penelitian tersebut digunakan populasi yaitu 5 kabupaten di Provinsi DIY dan menggunakan *teknik sampling* yaitu jumlah sampel sama dengan jumlah populasi. Metode analisis regresi data panel digunakan untuk mengestimasi model regresi ini. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel Indeks Pembangunan Manusia dan upah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi DIY. Variabel pertumbuhan ekonomi dan pengangguran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi DIY.

5. Zulfikar (2016) melakukan penelitian dengan judul “*Analisis Pengaruh Pendapatan Per Kapita, Pendidikan, Kesehatan, dan Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2011*”. Penelitian tersebut menggunakan variabel bebas yaitu Pendapatan Per Kapita, Pendidikan, Kesehatan, dan Pengangguran. Sedangkan Tingkat Kemiskinan di 26 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 digunakan sebagai variabel terikat. Data sekunder dari Badan Pusat Statistik dan *Indonesia Database for Policy and Economic Research* digunakan dalam penelitian tersebut. Metode *Fixed Effect Model (FEM)* digunakan untuk mengestimasi model regresi yang bertujuan mengetahui faktor-faktor penentu Kemiskinan di Jawa Barat. Hasil dari penelitian tersebut yaitu variabel-variabel independen berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Variabel PDRB Per Kapita, Angka Melek Huruf, dan Angka Harapan Hidup berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan secara parsial, sedangkan variabel Tingkat Pengangguran Terbuka menunjukkan indikator yang tidak signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Barat pada periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 .
6. Ariyaningtyas (2015) melakukan penelitian dengan judul “*Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Provinsi Jawa Timur Tahun 2007-2013*”. Penelitian tersebut menggunakan variabel bebas yaitu Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi dan

Pengangguran. Sedangkan tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur periode tahun 2007-2013 digunakan sebagai variabel terikat. Hasil dari estimasi *model fixed effect* dengan *cross section weight* dan *white heteroskedasticity consistent covariance* yaitu Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur dengan probabilitas signifikan secara simultan. Secara parsial variabel Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur, variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur dan variabel pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.

7. Astuti (2015) melakukan penelitian dengan judul "*Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2004-2012*". Penelitian tersebut menggunakan variabel bebas yaitu jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Sedangkan jumlah penduduk miskin di Indonesia periode tahun 2004-2012 digunakan sebagai variabel terikat. Analisis data panel dengan *Random Effect Model* digunakan untuk mengolah data. Hasil dari penelitian tersebut yaitu variabel jumlah penduduk, pendidikan dan kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan. Variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh

negatif dan tidak signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2004 sampai dengan tahun 2012.

8. Yudha (2103) melakukan penelitian dengan judul “*Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Inflasi terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 2009-2011*”. Penelitian tersebut menggunakan variabel bebas yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Inflasi. Sedangkan kemiskinan di Indonesia periode tahun 2009-2011 digunakan sebagai variabel terikat. Metode *Fixed Effect Model (FEM)* digunakan untuk mengestimasi model regresi dalam penelitian tersebut. Hasil dari penelitian tersebut yaitu pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Variabel upah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.
9. Sukmaraga (2011) melakukan penelitian dengan judul “*Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, PDRB per kapita, dan Jumlah Pengangguran terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah*”. Penelitian tersebut menggunakan variabel bebas yaitu Indeks Pembangunan Manusia, PDRB per kapita dan jumlah pengangguran. Sedangkan jumlah penduduk miskin di Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah digunakan sebagai variabel terikat. Analisis regresi linear berganda

dengan metode OLS yang menggunakan data *cross section* Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 digunakan dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian tersebut yaitu variabel IPM berpengaruh negatif dan signifikan, PDRB per kapita berpengaruh negatif dan signifikan, dan jumlah pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah.

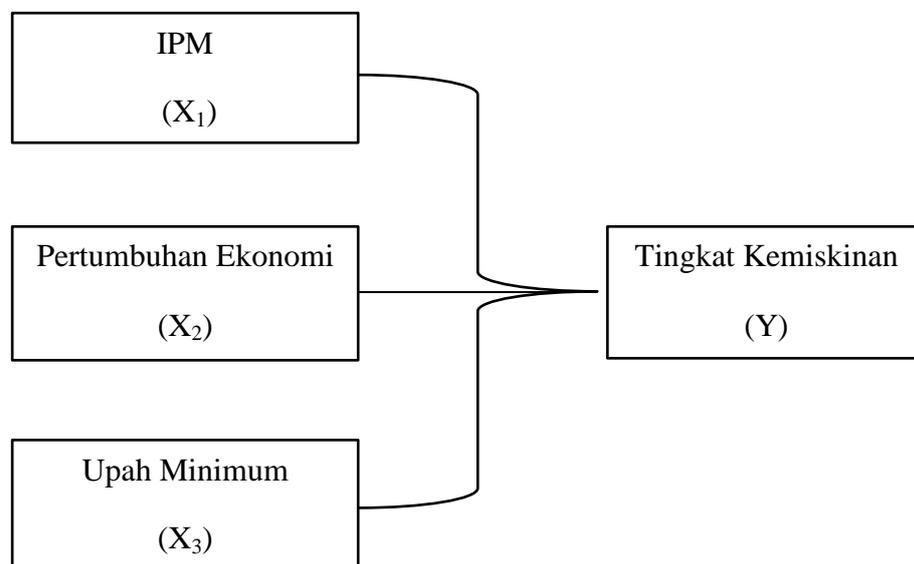
10. Saputra (2011) melakukan penelitian dengan judul “*Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, IPM, Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten / Kota Jawa Tengah*”. Penelitian tersebut menggunakan variabel bebas yaitu jumlah penduduk, PDRB, Indeks Pembangunan Manusia dan pengangguran. Sedangkan tingkat kemiskinan di Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah digunakan sebagai variabel terikat. Metode *Fixed Effect Model (FEM)* digunakan untuk mengestimasi model regresi dalam penelitian tersebut. Hasil dari penelitian tersebut yaitu secara keseluruhan variabel bebas (jumlah penduduk, PDRB, Indeks Pembangunan Manusia dan pengangguran) berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Variabel jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah, PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah, Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah, dan pengangguran memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah.

11. Bird dan Chris (2008) dalam jurnal yang berjudul "*Minimum Wages and Poverty in a Developing Country: Simulations from Indonesia's Household Survey*", berfokus pada upah minimum, distribusi pendapatan, dan kemiskinan. Dalam penelitian ini, Indonesia dijadikan sebagai studi kasus. Pendekatan simulasi menilai siapa yang diuntungkan dan siapa yang membayar kenaikan upah minimum. Bagi orang miskin, kenaikan upah minimum meningkatkan pendapatan bersih.
12. Addison dan McKinley (1999) dalam jurnal yang berjudul "*Minimum Wages and Poverty*" menganalisis tentang pengaruh distribusi upah minimum didasarkan pada latihan simulasi yang menggunakan asumsi pembatasan yang menjamin kesimpulan bahwa kenaikan upah minimum mengurangi kemiskinan. Pembeneran utama undang-undang upah minimum adalah klaim bahwa hal itu akan memperbaiki kondisi ekonomi pekerja berpendapatan rendah. Penelitian ini mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel yang menghubungkan peningkatan upah minimum terhadap perubahan tingkat kemiskinan.
13. Lustig dan Darryl (1997) dalam jurnal yang berjudul "*Minimum Wages and Poverty in Developing Countries: Some Empirical Evidence*" menganalisis dampak perubahan upah minimum terhadap kemiskinan. Temuan empiris dari penelitian tersebut adalah upah minimum dan kemiskinan berbanding terbalik yaitu kenaikan upah minimum riil disertai oleh penurunan kemiskinan. Hasil yang sama diperoleh dengan menggunakan variasi langkah-langkah kemiskinan (rasio jumlah kepala

dan kesenjangan kemiskinan), garis kemiskinan (rendah dan tinggi), dan kelompok penduduk (perkotaan dan pedesaan). Dapat disimpulkan bahwa kenaikan upah minimum adalah cara efektif untuk mengurangi kemiskinan.

D. Kerangka Penelitian

Untuk memudahkan dan memperjelas akar pemikiran dalam penelitian ini, maka dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran Teoritis

E. Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan atau kesimpulan yang masih bersifat sementara yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam suatu penelitian yang sebenarnya harus diuji secara empiris lebih lanjut. Berdasarkan beberapa kajian empiris yang telah dilakukan penelitian-penelitian terdahulu, maka diajukan hipotesis sebagai berikut :

1. Variabel Indeks Pembangunan Manusia diduga memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.
2. Variabel Pertumbuhan Ekonomi diduga memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.
3. Variabel Upah Minimum diduga memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.